

Kredibilitas Penyelenggara Pemilu



Istimewa : Foto Ayi Jufridar, dosen Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

Oleh Ayi Jufridar

Penyebaran kabar bohong atau hoaks senantiasa menjadi bagian dari pemilihan umum modern di Indonesia, apalagi sejak kehadiran internet dan media sosial (medsos). Masyarakat mendapat ruang untuk ikut menyiarkan informasi dan pendapat. Mereka tidak lagi sebatas konsumen informasi media massa seperti masa lalu. Kondisi ini memberi kesempatan luas bagi keseimbangan dan kesesatan informasi yang bahkan bisa berujung kepada penyebaran fitnah.

Serangan kabar bohong melalui medsos mulai lebih sistematis dan masif sejak Pemilu 2014. Saat itu, terutama dalam pilpres, badai hoaks menerpa pasangan calon dan tim kampanye. Komisi Pemilihan Umum (KPU) relatif lebih nyaman dan bisa fokus melaksanakan tahapan. Namun, dalam pemilu kali ini, hoaks juga menyasar penyelenggara pemilu, teristimewa KPU.

Demikian derasnya badai hoaks menerpa silih berganti, sampai-sampai KPU mensinyalmen ada upaya membangun ketidakpercayaan publik terhadap hasil pemilu. Saran terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk mengundurkan diri sebelum pemungutan suara juga mengesankan ketidakpercayaan terhadap netralitas dan integritas penyelenggara. Tentu ini juga mencerminkan mental kalah, sebelum bertarung.

Penyebar hoaks sepertinya tidak peduli adanya kelemahan logika dalam materi kasus yang mereka viralkan. Contoh, dalam kasus surat suara tujuh kontainer yang sudah dicoblos. Kabar itu beredar terlalu cepat, sebelum kedua kubu menyepakati foto pasangan calon yang akan digunakan dalam surat suara nanti.

Kabar yang bisa dikonfirmasi dengan tahapan pemilu dan peraturan perundang-undangan, akan mudah dipatahkan. Penyebar kabar barangkali tak peduli dengan lemahnya logika karena target mereka membuat kegaduhan dan mendorong publik meragukan kredibilitas penyelenggara.

Beberapa kabar bohong yang menjadi viral selama ini selalu dimulai dari medsos yang kemudian ditangkap media massa arus utama. Ketika isu itu pindah dari ruang medsos ke ruang media massa, akan menyedot perhatian lebih besar. Tingkat kepercayaan publik pun bertambah. Apalagi jika pemberitaan tersebut hanya memuat “balas pantun” antara satu kubu dan kubu lain, ditambah sedikit informasi normatif dari kepolisian yang memproses kasus tersebut.

Dalam kondisi inilah dibutuhkan kecerdasan media massa dalam mengelola isu dan tidak terjebak dalam setingan peserta pemilu baik legislatif maupun presiden. Setiap peserta pemilu memiliki tim kampanye yang pandai memanfaatkan berbagai isu yang bukan sekadar menyerang lawan, tapi juga mendapat iklan gratis pemberitaan. Janji-janji politik dan isu dengan magnitudo rendah akan sulit mendapat tempat di media massa. Salah satu cara untuk mencuri perhatian membuat isu-isu “wah” dan unik.

Edukasi

Seberapa pun merepotkannya badai hoaks bagi penyelenggara, tetap ada sisi positif yang bisa dimanfaatkan. Cara penyelenggara menanggapi isu akan menjadi ajang edukasi masyarakat ketika disampaikan pada waktu dan tempat yang tepat. Penyelenggara harus membangun argumentasi kuat berbasis aturan dan fakta yang tak terbantahkan.

KPU jangan hanya menjawab, “Bagaimana mungkin ada surat suara beredar, sedangkan surat suara saja belum dicetak.” Ini terdengar lugu seperti pernah disampaikan komisioner KPU di sebuah stasiun televisi, seolah mencetak surat suara palsu harus menunggu izin dari penyelenggara.

Di sisi lain, badai hoaks akan mendorong penyelenggara: KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) lebih patuh pada aturan dan transparan melaksanakan semua tahapan secara jujur sejak dari pikiran. Tidak ada ruang untuk memihak, berbuat tidak adil, apalagi curang di tengah sorot mata penegak hukum, media massa, peserta pemilu, pemantau, dan tentu saja pemilih selaku pemilik hak suara.

Tanggal: 22 March 2019

Post by: [riyandhi](#)

Kategori: [Artikel Opini](#),

Tags: [Unimal](#), [Aceh](#),